

PENGAWASAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM
MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOBA DIKOTA PEKANBARU

Ryan setiawan

Email: ryan_on3@yahoo.com

Dibimbing oleh : Drs. H. Isril, MH

Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293

Abstract

Ryan Setiawan (1001112089), Oversight of National Narcotic (BNN) in tackling drug abuse in the city of Pekanbaru, Adviser by Drs. H. Isril, MH.

Supervision which has been run by BNN Pekanbaru in performing its functions as a designated agency to tackle drug abuse in the city of Pekanbaru has been going well , but there are some indicators that still have not been able to run well . Indicators of employment report could not walk properly because the BNN reporting directly down the center of spaciousness that BNN Pekanbaru not have a concrete statement about the problem of drug abuse in the city of Pekanbaru . In the absence of such reports affect performance in terms of Pekanbaru City BNN supervision .

According to Griffin supervision is part of the management function that seeks to predefined plans can be achieved effectively and efficiently , in the process of supervision Griffin has set the standard three steps are set standards , conduct assessments, and conduct corrective action.

This study is a descriptive qualitative approach in which the author describes the supervision of BNN in tackling drug abuse in Pekanbaru and the factors that influence the control of drug abuse . Data collection technique is by interview and observation by using purposive sampling method . Key informants in this study is Kasubbag BNN Pekanbaru City Administration .

The results of the study authors was an oversight that has been run by BNN Pekanbaru City in exercising its functions as an agency that oversees drug abuse in Pekanbaru has been going well but there are some indicators that are still not maximized because supervision is not done routinely and uniformly in all circles so much abuse drugs in the city of Pekanbaru .

Keywords : Monitoring , Drugs

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan damai. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, perlu dilakukan upaya secara terus menerus dibidang keamanan dan ketertiban serta dibidang kesejahteraan rakyat dengan memberikan perhatian khusus terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Sejarah penyalahgunaan narkoba didunia menunjukkan bahwa jenis narkoba yang disalahgunakan berubah dari masa kemasa, dahulu jenis narkotika, sekarang jenis amfetamin yang banyak disalahgunakan, tetapi yang paling penting adalah bahwa penyalahgunaan narkoba menunjukkan peningkatan tajam dimanapun diseluruh Indonesia.

Menghadapi permasalahan penyalahgunaan narkoba yang makin serius di hampir semua Negara diseluruh dunia, Persatuan Bangsa Bangsa dalam sidang *International Conference on Drug Abuse and Illicit Trafficking* tanggal 17-25 Juni 1987 di Wina-Austria, telah menggariskan *Comprehensive Multidisciplinary outline* (CMO) yang berisi rekomendasi-rekomendasi tentang tindakan praktis dibidang penanggulangan penyalahgunaan narkoba kepada Negara-negara dan badan-badan nasional untuk digunakan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan non pemerintah.

CMO tersebut telah menggariskan asas-asas umum bagi penyusunan strategi nasional penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba oleh badan yang bersangkutan, dalam kaitan ini di

Indonesia adalah Badan Narkotika Nasional (BNN), sebagai berikut:

1. Menentukan sasaran-sasaran yang jelas dan dapat dicapai.
2. Menentukan kelompok-kelompok sasaran dengan mengutamakan upaya untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja.
3. Menggunakan pendekatan seimbang antara pengurangan permintaan gelap (*demand reduction*) dan pengawasan peredaran gelap narkoba (*supply reduction*).
4. Menentukan program jangka panjang yang bersifat komprehensif.
5. Mengembangkan dan melaksanakan program berdayakan ideologi dan musabab permasalahan.
6. Mengadakan evaluasi berkala terhadap hasil yang dicapai dari program-program yang direncanakan.
7. Mengkoordinasikan dan memadukan tugas dan program dari semua instansi terkait pada tingkat nasional dan daerah.
8. Merumuskan dan melaksanakan strategi nasional dengan memperhatikan sumber dan potensi yang ada serta menggunakan pendekatan pembiayaan efektif, bila perlu dengan bantuan luar negeri.
9. Memantau dan mengembangkan potensi kegiatan masyarakat.
10. Memanfaatkan secara maksimal pengalaman Negara-negara lain dalam penanggulangan permasalahan narkoba, serta memberikan pengalaman sendiri kepada yang lain.

Untuk mengupayakan kerjasama bilateral, regional, multilateral dengan

Negara lain atau badan internasional guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba sesuai badan koordinasi narkoba yang dibagi menjadi tiga tingkatan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 83 tahun 2007, yaitu:

1. Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah Lembaga Non Struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

BNN mempunyai tugas membantu Presiden dalam :

- a) Mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakandan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang ketersediaan dan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psicotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya atau dapat disingkat dengan P4GN.
 - b) melaksanakan P4GN dengan membentuk satuan tugas yang terdiri atas unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.
2. Badan Narkotika Propinsi (BNP) adalah Lembaga Non Struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.

BNP mempunyai tugas membantu Gubernur dalam:

- a) Mengoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di Provinsi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional BNN di bidang ketersediaan dan P4GN.
- b) Membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNN yang terdiri atas unsur perangkat daerah

dan instansi pemerintah di Provinsi sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

3. Badan Narkotika Kota (BNK) adalah Lembaga Non Struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati / Walikota.

BNK mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota dalam:

- a) Mengoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten/Kota,dalam mengimplementasikan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang P4GN.
- b) Membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNN yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah diKabupaten/Kota sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Pada dasarnya narkoba di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-undang Narkoba hanya melarang penggunaan narkoba tanpa izin oleh Undang-undang yang dimaksud.

Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkoba sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkoba khususnya generasi muda.

Menurut Undang-Undang No.35 tahun 2009 narkoba dibagi atas 3 golongan, Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Narkotika Golongan II dan Golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis, yang digunakan untuk produksi obat. Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan kesediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyalahgunaan narkoba di Indonesia terutama di kota-kota besar sudah menjadi masalah yang sangat serius dan sulit untuk diatasi, termasuk Pekanbaru yang menjadi sasaran sindikat narkoba untuk mengedarkan narkoba karena memiliki potensi yang sangat bagus dilihat dari segi wilayah kota Pekanbaru yang sangat luas dan strategis.

Belakangan ini Kota Pekanbaru memang sedang dihadapkan dengan masalah serius terkait kasus penyalahgunaan narkoba yang sedang marak, terutama dikalangan remaja yang banyak menjadi korban penyalahgunaan narkoba.

Tabel 1.1 Daftar pengguna penyalahgunaan narkoba di Pekanbaru yang digolongkan berdasarkan usia pengguna.

No.	Usia Pengguna (Thn)	Jumlah (Org)
1	0 – 15	4
2	16 – 19	50
3	20 – 24	88
4	25 – 29	84
5	>30	101
Jumlah		327

Sumber: Data BNN Kota Pekanbaru, 2014

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa penyalahgunaan sudah dimulai dari umur 0 – 15 tahun dan puncaknya terdapat pada umur 30 tahun ke atas, dalam hal ini BNN sangat berperan

penting dalam mengawasi penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang di dalamnya diatur juga sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, maka Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkoba dewasa ini. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, hal mana belum diatur dalam Undang-undang yang lama.

Menurut UU No. 35 tahun 2009 pasal 54 “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Selain metode rehabilitasi medis penyembuhan terhadap pecandu narkoba bisa dilakukan dengan pendekatan keagamaan atau spiritual. Banyaknya kasus narkoba yang terungkap di Pekanbaru menunjukkan kinerja yang cukup baik dari Badan Narkotika Kota Pekanbaru dalam memberantas peredaran penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru.

Tabel 1.2 Data kasus penyalahgunaan Narkotika yang di tangani BNN Kota Pekanbaru dalam tiga (3) tahun terakhir

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka (Org)
2011	45	60
2012	64	91
2013	70	142

Sumber: Data BNN Kota Pekanbaru, 2014

Dari tabel di atas dapat kita lihat setiap tahunnya penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru meningkat ini disebabkan karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut tentang narkoba belum dapat diredakan, kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang pada masa sekarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operasi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan mengawasi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya bagi generasi penerus bangsa.

Diantara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba ialah Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru, yang diharapkan mampu membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba. Kejahatan narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas kejahatan yang telah merenggut banyak nyawa anak bangsa ini.

Penyalahgunaan narkoba saat ini menjadi masalah yang sangat memprihatinkan dan cenderung semakin meningkat serta merupakan masalah bersama antara yang melibatkan pemerintah dan masyarakat sehingga memerlukan suatu pengawasan Penyalahgunaan Narkoba (P4GN) merupakan program yang dilaksanakan oleh BNN.

Mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan lintas bidang terkait, meningkatkan kualitas individu aparat, serta menumbuhkan kesadaran, kepedulian dan peran serta aktif seluruh komponen masyarakat melalui lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, pelajar, mahasiswa dan pemuda, pekerja, serta

lembaga-lembaga lainnya yang ada di masyarakat. (Pendidikan, Kesehatan sosial, Sosial-Akhlak, Sosial-pemuda & OR Ekonomi-Tenaga Kerja). Mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap, dengan upaya-upaya yang berbasiskan masyarakat mendorong dan menggugah kesadaran, kepedulian dan peran serta aktif seluruh komponen masyarakat dengan motto yang menjadi pendorong semangat adalah "Mencegah Lebih baik Daripada Mengobati".

Pengawasan penyalahgunaan narkoba terutama diarahkan kepada generasi muda (anak, remaja, pelajar, pemuda, dan mahasiswa). Penyalahgunaan sebagai hasil interaksi individu yang kompleks dengan berbagai elemen dari lingkungannya, terutama dengan orang tua, sekolah, lingkungan masyarakat remaja/pemuda lainnya, oleh karena itu strategi informasi dan pendidikan pencegahan dilaksanakan melalui 7 (tujuh) jalur yaitu :

1. Keluarga, dengan sasaran orang tua, anak, pemuda, remaja dan anggota keluarga lainnya.
2. Pendidikan, sekolah maupun luar sekolah/dengan kelompok sasaran guru/tenaga pendidikan dan peserta didik/warga belajar baik secara kurikuler maupun ekstrakurikuler.
3. Lembaga keagamaan, dengan sasaran pemuka agama dan umatnya.
4. Organisasi social kemasyarakatan, dengan sasaran remaja/pemuda dan masyarakat.
5. Organisasi wilayah pemukiman (LKMD, RT, RW), dengan sasaran warga terutama pemuka masyarakat dan remaja setempat.

6. Unit-unit kerja, dengan sasaran pimpinan, karyawan dan keluarganya.
7. Massa media baik elektronik, cetak dan media interpersonal (talk show dan dialog interaktif), dengan sasaran luas maupun individu.

Dari latar belakang diatas maka peneliti memberi judul dalam penelitian ini adalah **“PENGAWASAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOBA DIKOTA PEKANBARU”**.

RUMUSAN MASALAH

Sehubungan dengan semakin maraknya kasus narkoba dikalangan remaja yang merupakan generasi penerus bangsa, maka pemerintah semakin memperkuat peran serta kewenangan dari Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dalam hal proses penyidikan terhadap Tindak Pidana Narkotika. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimanakah Pengawasan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba dikota Pekanbaru
- 2) Faktor-faktor apa yang menghambat Pengawasan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba dikota Pekanbaru

TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pengawasan Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba dikota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengawasan

Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba dikota Pekanbaru

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

a. Secara Teoritis

Untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah serta melatih penulis menerapkan teori – teori mengenai pengawasan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba dikota Pekanbaru.

b. Secara Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan dan sumbangan pemikiran bagi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi peredaran narkoba dikota Pekanbaru.
- 2) Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang ingin melanjutkan penelitian dengan masalah yang sama.
 - a) Masukan bagi masyarakat umum dalam memahami tugas dan tanggung jawab pemerintah termasuk badan usaha pemerintah dalam melakukan fungsinya.

KONSEP TEORI

Sistem pengawasan organisasi memiliki 3 (tiga) langkah fundamental dalam setiap prosesnya (Griffin, 2004: 167). Masing-masing langkah ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Menetapkan Standar. Control Standard adalah target yang menjadi acuan perbandingan untuk kinerja dikemudian hari. Standar yang ditetapkan untuk tujuan pengawasan harus diekspresikan dalam acuan yang dapat diukur. Strategi pengawasan harus konsisten dengan tujuan organisasi. Dalam penentuan standar, diperlukan pengidentifikasian

indikator-indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran kinerja yang menyediakan informasi yang berhubungan langsung dengan objek yang diawasi. Standar bagi hasil kerja karyawan pada umumnya terdapat pada rencana keseluruhan maupun rencana-rencana bagian. Agar standar itu diketahui secara benar oleh karyawan, maka standar tersebut harus dikemukakan dan dijelaskan kepada karyawan sehingga karyawan akan memahami tujuan yang sebenarnya ingin dicapai.

2. Mengukur Kinerja. Pengukuran Kinerja adalah aktivitas konstan dan kontinu bagi sebagian besar organisasi. Agar pengawasan berlangsung efektif, ukuran-ukuran kinerja harus valid. Kinerja karyawan biasanya diukur berbasis kuantitas dan kualitas output, tetapi bagi banyak pekerjaan, pengukuran kinerja harus lebih mendetail.
3. Menentukan Kebutuhan Tindakan Korektif. Berbagai keputusan menyangkut tindakan korektif sangat bergantung pada keahlian-keahlian analitis dan diagnostis manager. Setelah membandingkan kinerja dengan standar, manager dapat memilih salah satu tindakan : mempertahankan status quo (tidak melakukan apa-apa), mengoreksi penyimpangan, atau mengubah standar. Tindakan perbaikan diartikan sebagai tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk melaksanakan tindakan perbaikan, maka harus diketahui apa yang menyebabkan penyimpangan.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti berusaha untuk mengungkapkan fakta sesuai dengan

kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi. Menurut Nazir (2003: 54), penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah suatu metode penelitian suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, dan suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa masa sekarang. **Creswell (2002: 1)** menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah.

Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif (gambaran) dan hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis memilih daerah ini sebagai lokasi penelitian dengan melihat kenyataan di lapangan dan melihat adanya kecenderungan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya paham mengenai fungsi dan strategi Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dalam penanggulangan peredaran narkoba.

3. Informan Penelitian

Tujuan dan prosedur sampling dalam penelitian kualitatif lebih terfokus kepada representasi terhadap fenomena sosial. Penelitian kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman). Data atau informasi harus ditelusuri seluas luasnya (sedalam mungkin) sesuai dengan variasi yang ada. Hanya dengan cara demikian, peneliti

mampu mendeskripsikan fenomena yang diteliti secara utuh. Berkenaan dengan tujuan penelitian kualitatif diatas, maka dalam prosedur sampling yang terpenting adalah bagaimana menentukan informan kunci (*key informan*). Dalam memperoleh data dari informan selanjutnya dengan menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel yang dianggap benar dan mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Adapun responden dalam penelitian ini, akan di tentukan setelah peneliti terjun langsung ke lapangan dan setelah penulis menentukan lokasi sebagai lokus penelitian.

Informan kunci adalah orang yang mengetahui permasalahan secara mendalam. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru
- b. Humas Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru
- c. Masyarakat

4. Tekhnik Pengumpulan Data

- a. Wawancara mendalam (*Depth Interview*) yaitu percakapan yang dilakukan oleh dua pihak (pewawancara dan terwawancara) dengan maksud menggali apa yang tersembunyi di sanubari seseorang, apakah menyangkut masa lampau, masa kini, dan masa depan guna memahami suatu fenomena sosial sesuai dengan dunia pemahaman para pelakunya itu sendiri (Faisal dalam Bungin:2003). Peneliti mengadakan wawancara mendalam terhadap key informan guna memperoleh data dan memahami peranan Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dalam menanggulangi penyalahgunaan peredaran gelap narkotika.
- b. Observasi yaitu pengamatan yang bertujuan mengenali berbagai rupa kejadian, peristiwa, keadaan, tindakan yang mempola dari hari ke hari ditengah masyarakat, mana yang lazim atau tidak lazim. Kegiatan observasi

tidak hanya dilakukan terhadap kenyataan – kenyataan yang terlihat, tetapi juga terhadap apa yang terdengar. Berbagai macam ungkapan atau pertanyaan yang terlontar dalam percakapan sehari – hari juga termasuk bagian dari kenyataan yang bisa diobservasi; observasinya melalui indera pendengaran (Faisal dalam Bungin:2003). Disini peneliti mendapatkan data berdasarkan hasil pengamatan langsung, dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala – gejala (situasi sosial) mengenaiperanan Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dalam penanggulangan tindak pidana narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

5. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer adalah data utama yang diperoleh dari *key informan* penelitian, berupa kata – kata dan tindakan yang berhubungan dengan persepsi atau opini mengenai strategi Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dalam penanggulangan peredaran narkoba dikota pekanbaru.
2. Data Sekunder merupakan data atau informasi serta keterangan tambahan yang didapatkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca berbagai literatur seperti buku, jurnal dan pemberitaan media massa seputar masalah tersebut atau data yang diambil dari beberapa dokumen mengenai gambaran umum lokasi penelitian. Dimana data ini diperoleh untuk melengkapi data primer yang didapatkan, seperti laporan – laporan, peraturan – peraturan, lampiran data, bahkan foto yang dapat mendukung dan menjelaskan masalah.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data

deskriptif kualitatif, yaitu untuk pengolahan data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara dan pengamatan di lapangan, semua informasi yang dikumpulkan dipelajari sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh.

Analisis data yang dipakai dalam penelitian kualitatif seperti yang dijelaskan Moleong (2004: 280) melalui beberapa tahap analisis yaitu:

a. Reduksi data

Data yang diperoleh atau yang terkumpul dalam penelitian direduksi guna menajamkan analisis, menonjolkan hal-hal yang penting dalam menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak dibutuhkan dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis, sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan yang bermakna.

b. Klasifikasi data

Data yang dikumpulkan dikelompok - kelompokkan misalnya data tentang strategi Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi peredaran narkoba dipekanbaru.

c. Interpretasi data

Data yang telah diklasifikasi kemudian diterangkan atau dicari artinya dan kemudian berakhir pada penarikan kesimpulan dan menjelaskan implikasinya.

d. Pengambilan kesimpulan dan verifikasi

Setelah semua data yang berkaitan dengan strategi Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dalam menanggulangi peredaran narkoba dipekanbaru dan faktor – faktor yang mempengaruhi strateginya diperoleh, kemudian dikaitkan dengan teori tugas pokok dan fungsi, maka dapat ditarik kesimpulan yang bersifat sempurna

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang penulis lakukan baik melalui wawancara, interview dan observasi yang ditujukan untuk mencari informasi mengenai pengawasan Badan

Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Deskriptif kualitatif, yaitu suatu teknik menganalisa data dengan menggambarkan secara utuh kenyataan mengenai permasalahan yang diteliti. Setelah data didapat kemudian dianalisa secara deskriptif, kemudian untuk mengetahui bagaimana pengawasan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru.

Analisis Pengawasan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru.

Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Pengawasan merupakan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dalam pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil analisis peneliti terhadap pengawasan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kota pekanbaru ternyata belum maksimal karena masih marak nya penyalahgunaan narkoba, ini dapat kita lihat dari beberapa indikator :

1. Menetapkan standar

Menetapkan standar adalah target atau ukuran yang ingin dicapai dalam melakukan pengawasan terhadap Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kota pekanbaru. Dengan membuat rencana pengawasan dengan baik maka dapat di programkan dalam melakukan pengawasan-pengawasan selanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.

Dalam penentuan standar diperlukan indikator-indikator kinerja.

Indicator kinerja adalah ukuran kinerja yang menyediakan informasi yang berhubungan langsung dengan objek yang diawasi. Ada dua standar yang digunakan untuk mengukur pengawasan yaitu bentuk fisik dan bentuk materil.

a. Bentuk fisik

Agar standar itu diketahui secara benar oleh pegawai BNN kota Pekanbaru maka standar itu harus dikemukakan sehingga pegawai BNN kota Pekanbaru dapat memahami tujuan yang ingin dicapai.

b. Bentuk materil

Untuk mencapai terlaksananya program kerja yang baik tentu saja BNN kota Pekanbaru tidak melakukan pengawasan dalam bentuk fisik saja tetapi juga materil, karena dengan adanya materil ini dapat menunjang pengawasan dalam bentuk fisik yang dilakukan oleh BNN kota Pekanbaru supaya ada keselarasan antara bentuk fisik dan materil.

2. Melakukan tindakan penilaian

Melakukan tindakan penilaian adalah mengukur suatu kinerja dalam suatu instansi / badan dalam melakukan pengawasan. Apakah pengawasan sudah efektif atau tidak, dalam hal ini adalah kemampuan BNN Kota Pekanbaru dalam mengawasi penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru. Kemampuan tersebut dapat kita lihat dari hasil sidak dan laporan dalam melakukan pengawasan.

a. Sidak

Tindakan sidak sangat di perlukan karena ini bisa membuat pelaku penyalahgunaan narkoba jera dan berkurang, BNN Kota Pekanbaru sangat berperan penting dalam Pengawasan penyalahgunaan narkoba di kota pekanbaru.sehingga dalam mengawasi nya dilakukan sidak di berbagai tempat yang di anggap sarang dari penyalahgunaan narkoba.

b. Laporan

Laporan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh instansi atau badan terkait untuk mengukur tindakan penilaian dari kegiatan yang sudah ditentukan. Dalam hal ini seharusnya BNN kota Pekanbaru

mempunyai laporan terhadap penyalahgunaan narkoba dikota pekanbaru.

3. Melakukan Tindakan Koreksi

Menentukan kebutuhan akan tindakan koreksi sangat bergantung kepada keahlian dan kemampuan pimpinan dalam menganalisa setiap hasil dari pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dilapangan. Hal tersebut dapat dilihat dari sub indikator sebagai berikut.

a. Koreksi

Koreksi dapat diartikan juga dengan tindakan perbaikan yang diambil oleh BNN kota Pekanbaru untuk mencari tahu apa penyebab masih banyaknya penyalahgunaan narkoba dikota Pekanbaru kemudian hasil pekerjaan nyata yang menyimpang bisa dioptimalkan. Tetapi semua tindakan koreksi yang diambil oleh BNN kota Pekanbaru tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan, aka nada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang melindungi atau membocorkan operasi yang akan dilaksanakan pada tempat-tempat yang akan dirazia.

b. Hasil evaluasi

Hasil evaluasi ialah tindakan perbaikan yang diambil oleh BNN Kota Pekanbaru untuk mencari tahu penyebab penyalahgunaan narkoba dikota Pekanbaru, kemudian menyesuaikan hasil kerja nyata yang menyimpang agar dapat dioptimalkan dan sesuai standar yang ada. Hasil evaluasi dapat kita lihat dengan kinerja BNN Kota Pekanbaru yang sudah bekerja keras dalam mengurangi penyalahgunaan narkoba dikota Pekanbaru.

Faktor-faktor yang menghambat Pengawasan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba dikota Pekanbaru

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengawasan penyalahgunaan narkoba dikota Pekanbaru dapat disimpulkan faktor-faktor yang

menghambat adalah koordinasi karena kegiatan pengawasan tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja. Ini disebabkan masalah penyalahgunaan narkoba merupakan masalah sosial jadi seluruh elemen harus terlibat dalam mengawasi penyalahgunaan narkoba.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain:

1. Pengawasan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kota Pekanbaru dalam kategori belum maksimal karena pengawasan yang dilakukan tidak rutin dan merata di semua kalangan sehingga masih banyak penyalahgunaan narkoba di kota Pekanbaru.
2. Faktor-faktor yang menghambat Pengawasan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kota Pekanbaru yaitu kurangnya koordinasi antara BNN kota Pekanbaru dengan semua pihak untuk mengawasi penyalahgunaan narkoba dan dengan jumlah penduduk Pekanbaru yang relatif padat tentunya BNN kota Pekanbaru tidak bisa mengatasi penyalahgunaan narkoba tanpa adanya dukungan semua pihak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Agar pengawasan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kota Pekanbaru lebih efektif, maka perlu adanya koordinasi antara Badan Narkotika Nasional dengan seluruh instansi dan melibatkan semua lapisan masyarakat untuk mewujudkan Pekanbaru bebas narkoba.
2. Seharusnya Badan Narkotika Nasional (BNN) lebih mengoptimalkan tanggungjawab sebagai instansi yang

dipercaya oleh Pemerintah untuk menangani masalah narkoba di Kota Pekanbaru serta lebih tegas terhadap para penyalahguna narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achmad S, Ruky. 2003. *Administrasi publik dan bisnis*. Pekanbaru: jurnal
- Brantas. 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Lifesta
- Bohari. 1992. *Pengawasan Keuangan Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Fisipol UGM
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Manajemen Sumber daya Manusia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Griffin. 2005. *Manajemen Kepegawaian*. Bandung: Manjar Maju
- Harahap, Sofyan Syafri. 2000. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta: Pustaka Quantum
- Jerome, Paul J. 2001. *Mengevaluasi Kinerja Karyawan*. Jakarta: PPM
- Keban, Yaremis T. 2004. *Indikator Kinerja Pemda: Pendekatan Manajemen dan Kebijakan*. Yogyakarta: Makalah
- Koontz, Harold & Cyril O'Donnel & Heinz Weihrich. 1986. *Manajemen Jilid 2 terjemahan: Gunawan Hutauruk*. Jakarta: Penerbit erlangga
- Mahsum, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Maman, Ukas. 2004. *Manajemen, konsep, prinsip dan aplikasi*. Bandung: Penerbit Agnini

- Manullang. 2008. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Marnis. 2008. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: Unri Press
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2002. *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Refika Aditama
- Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik : Teori dan Praktek*. Jakarta: Grasindo
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Prawiro, Suntoro. 1996. *Kinerja Pegawai*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia
- Reksohardiprodjo, Sukanto. 2008. *Dasar-dasar Manajemen, edisi keenam, cetakan kelima*. Yogyakarta: BPFE
- Robbins, P Stephen. 2001. *Teori Organisasi: struktur, desain & aplikasi*. Jakarta: Arcan
- Sarwoto. 2010. *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen, cetakan keenambelas*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sedermawanti. 2003. *Good Governance*. Bandung: Penerbit, CV Mandar Maju
- Siagian, Sondang P. 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Siswandi dan Indra Iman. 2009. *Aplikasi Manajemen Perusahaan, edisi kedua*. Jakarta: Mitra Wicana Media
- Sinambela, Lijan Poltak dkk. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sule Erni Trisnawati, dan Kurniawan Saefullah. 2005. *Pengantar Manajemen, edisi pertama, cetakan pertama*. Jakarta: Prenada Media
- S.P Hasibuan, M. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Soehartono, Irwan. 2004. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja rosdakarya
- Suganda, Dunn. 1992. *Pengantar Administrasi Negara*. Jakarta: Alfabeta
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Terry, R. George. 2006. *Azas-azas Manajemen*. Bandung: PT Alumni. Cetakan kelima
- Victor, M. Situmorang, dan Jusuf juhir. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Yogyakarta: Rineka Cipta
- Widodo, Joko. 2006. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Jakarta: Bayumedai Publishing